

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK,  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS  
PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIFKI AHMAD PRATAMA**

**NIM. 12030114183004**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK,  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS  
PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIFKI AHMAD PRATAMA**

**NIM. 12030114183004**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

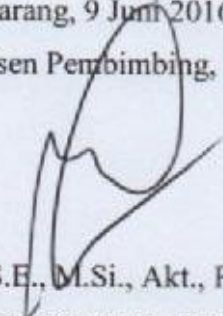
Nama Penyusun : Rifki Ahmad Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183004  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK,  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS  
PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH**

Dosen Pembimbing : Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 9 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

  
Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

NIP 197109042001121001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rifki Ahmad Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183004  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK,  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS  
PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Juni 2016

Tim Penguji

1. Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

(.....)

2. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

(.....)

3. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.

(.....)



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rifki Ahmad Pratama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Rifki Ahmad Pratama

NIM. 12030114183004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“WORK HARD, PLAY HARD AND PRAY HARD  
UNTIL SOMETHING HAPPEN”**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu, Bapak dan Adik tercinta.

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the effect of the audit results by Audit Board of Indonesia (BPK), the financial performance of local governments and the size of local governments on the local governments corruption perception index. The variables tested in this research are audit opinion on the financial statements of local government, the findings on the internal control system, the findings on compliance with laws and regulations, self-reliance ratio, growth ratio, the ratio of effectiveness and the size of local governments.*

*This study uses secondary data derived from the results of the audit report by BPK on the financial statements of local governments in 2009 fiscal year and local governments corruption perception index derived from research reports by Transparency International Indonesia in 2010. The method uses in this study on selecting the samples are purposive sampling method. The data in this study tested using classic assumption test and correlation analysis. The hypothesis in this study tested using multiple linear regression analysis.*

*The results showed that not all the audit results by BPK has a significant influence on the local governments corruption perception index. Findings on compliance with the legislation is the only variable of the audit results by BPK with significant influence and negatively affect the local governments corruption perception index. Based on the financial performance of local governments, the variables that have a significant influence on the local government corruption perception index only independence ratio and effectiveness ratio and which have a positive influence on the local government corruption perception index. The size of local governments have a significant negative effect on the local government corruption perception index.*

*Keywords: audit results by Audit Board of Indonesia (BPK), the financial performance of local governments, the size of local governments, the local governments corruption perception index.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, temuan atas sistem pengendalian intern, temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan ukuran pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2009 serta nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang berasal dari laporan hasil penelitian Transparency International Indonesia tahun 2010. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak seluruhnya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi. Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan satu-satunya variabel dari hasil pemeriksaan BPK yang mempunyai pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hanya variabel rasio kemandirian dan rasio efektivitas yang mempunyai pengaruh signifikan dan kedua rasi tersebut berpengaruh positif terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah. Selain itu, ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai indeks persepsi korupsi.

Kata kunci: hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, indeks persepsi korupsi pemerintah daerah.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan dan keperkasaan. Engkau tetap Yang Maha Agung, sedang semua makna akan lebur, mencair, di tengah keagungan-Mu, wahai Rabbku atas limpahan berkah, kasih sayang, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH.**

Shalawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada teladan dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah untuk menegakkan Agama Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa usaha yang penulis lakukan selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini tidak ada artinya tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah SWT, secara langsung maupun melalui berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis. Karena itu, selain ucapan syukur kepada-Nya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis Ayahanda Dedi Suherdian, Ibunda Anne Hartati, dan Riza Ahmad Fauzi atas kasih sayang yang tiada bertepi, didikan yang tanpa pamrih, pengorbanan yang tanpa batas, dukungan yang begitu

berarti, dan senantiasa mendoakan penulis. Hanya Allah yang bisa membalasnya dengan Surga-Nya. Amiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

2. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Faisal, S.E., M.Si., Akt, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Diponegoro.
6. Para dosen yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Deasy Aryaningsih, atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seangkatan tugas belajar Undip, terutama F9 team (Aizhar, Andez, Endri, Erte, Fahren, Ipang, Janu, Juri, Lambok, Pepeng, Oka) yang telah menemani penulis selama kurang lebih dua tahun dalam susah dan senang.
9. Rekan-rekan di kantor pusat BPK yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini dalam menyediakan data pendukung.

10. Teman-teman Undip yang telah membantu penulis dalam kegiatan belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan tersebut. Selain itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, 9 Juni 2016

Penulis,

Rifki Ahmad Pratama  
NIM. 12030114183004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR GRAFIK .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	9
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	9
2.1.2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia .....	11

2.1.2.1. Dasar Hukum.....	11
2.1.2.2. Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	15
2.1.2.3. Hasil Pemeriksaan .....	16
2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.1.4. Korupsi .....	19
2.1.5. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) .....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran .....	28
2.4. Hipotesis.....	29
2.4.1. Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah .....	29
2.4.2. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah .....	31
2.4.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Nilai IPK Pemerintah Daerah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	33
3.1.1. Variabel Penelitian.....	33
3.1.1.1. Variabel Terikat ( <i>dependent variable</i> ) .....	33
3.1.1.2. Variabel Bebas ( <i>independent variable</i> ) .....	33
3.1.2. Definisi Operasional Variabel .....	33
3.1.2.1. Nilai IPK Pemerintah Daerah.....	33
3.1.2.2. Opini BPK .....	34

3.1.2.3.	Temuan atas Sistem Pengendalian Intern.....	36
3.1.2.4.	Temuan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	37
3.1.2.5.	Rasio Kemandirian .....	37
3.1.2.6.	Rasio Pertumbuhan .....	38
3.1.2.7.	Rasio Efektivitas .....	39
3.1.2.8.	Ukuran Pemerintah Daerah .....	39
3.2.	Populasi dan Sampel.....	40
3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5.	Metode Analisis.....	41
3.5.1.	Statistik Deskriptif.....	41
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik .....	42
3.5.2.1.	Uji Normalitas .....	42
3.5.2.2.	Uji Multikolinearitas .....	42
3.5.2.3.	Uji Heterokedastisitas .....	43
3.5.3.	Analisis Korelasi.....	43
3.5.4.	Uji Hipotesis .....	44
3.5.3.1.	Analisis Regresi.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	49
4.2.	Analisis Data .....	50
4.2.1.	Statistik Deskriptif.....	50



4.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	53
4.2.2.1. Uji Normalitas .....	53
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas .....	56
4.2.2.1. Uji Heterokedastisitas.....	58
4.2.3. Uji Analisis Korelasi.....	59
4.2.4. Uji Analisis Regresi Berganda.....	61
4.2.5. Pengujian Hipotesis .....	64
4.2.4.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) .....	64
4.2.4.2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) .....	65
4.2.4.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3).....	65
4.2.4.4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) .....	66
4.2.4.5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5).....	66
4.2.4.6. Pengujian Hipotesis Keenam (H6) .....	67
4.2.4.7. Pengujian Hipotesis Ketujuh (H7).....	67
4.3. Interpretasi Hasil .....	68
4.3.1. Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah.....	68
4.3.2. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah.....	70
4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah.....	72

BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Keterbatasan .....	76
5.3. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4.1	Pengambilan Sampel Penelitian .....	49
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	50
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	54
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4.5	Hasil Uji Hasil Uji <i>Pearson Correlation</i> .....	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	29
------------	--------------------------	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Grafik Normal Plot .....	55
Grafik 4.2	Grafik Normal Batang .....	56
Grafik 4.3	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	<i>Output</i> SPSS Statistik Deskriptif .....	83
Lampiran B	<i>Output</i> SPSS Uji Normalitas .....	84
Lampiran C	<i>Output</i> SPSS Uji Multikolinearitas.....	86
Lampiran D	<i>Output</i> SPSS Uji Heterokedastisitas .....	87
Lampiran E	<i>Output</i> SPSS Uji Korelasi.....	88
Lampiran F	<i>Output</i> SPSS Uji Regresi Berganda.....	89



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan suatu fenomena yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus* yang mempunyai arti berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003) sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006).

Banyak pihak yang menganggap bahwa korupsi merupakan suatu budaya turun temurun di Indonesia. Anggapan tersebut berdasarkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi Indonesia dari tahun ke tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pada tahun 2012 KPK menangani 49 perkara korupsi dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar 70 perkara (kpk.go.id, 2014). Selain itu, pada tahun 2014 Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan tahap penyelidikan perkara korupsi tahun 2011 hanya 699 kasus, kemudian meningkat menjadi 833 di 2012, dan 2013 menjadi 1.696 kasus. Sedangkan di tahap penyidikan, tahun 2011 terdapat 1.624 kasus, 2012 ada 1.401 kasus, dan di 2013 menjadi 1.646 kasus ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), 2014).

Korupsi di Indonesia terjadi di banyak sektor antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi-instansi lainnya. Kasus penyelewengan atau

korupsi yang tadinya terpusat di pemerintahan pusat menjadi berkembang di tingkat pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2005). Bahkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga membuktikan bahwa keuangan di daerah merupakan sumber potensi korupsi terbesar yang menyebabkan kerugian negara (Yuda, 2010). Korupsi yang terjadi banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dimana masih terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan posisi jabatannya maupun kurangnya pengawasan atas pengelolaan keuangan demi meraih keuntungan pribadi.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Pemerintah telah mengatur mengenai pengawasan pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan membentuk beberapa instansi dengan tujuan agar penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan negara serta korupsi di Indonesia dapat dihilangkan.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputrianti, 2008). Institusi pemeriksa yang dibentuk oleh pemerintah antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal masing-masing instansi pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam

memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi (Kinney dan McDaniel 1989, Kaufman *et al.* 2006).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di instansinya. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD. Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK berupa opini atas kewajaran laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, BPK seringkali menemukan temuan-temuan yang berpotensi merugikan negara. Temuan-temuan tersebut sering berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi di instansi-instansi pemerintah dimana temuan itu ditemukan. Temuan-temuan indikasi tindak pidana korupsi tersebut dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti oleh APH. Dalam proses tindaklanjut oleh APH, temuan-temuan BPK tersebut dapat menjadi dasar yang kuat apabila memang benar terbukti adanya tindak pidana korupsi.

Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, instansi pemerintah juga dituntut agar mempunyai kinerja keuangan yang baik dengan tujuan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Semakin baik kinerja keuangan

suatu instansi maka masyarakat luas beranggapan bahwa semakin kecil pula tingkat korupsi yang terjadi di instansi tersebut. Hal ini juga berlaku di tingkat pemerintah daerah dimana masyarakat beranggapan bahwa dengan semakin baiknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah maka tingkat korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin kecil.

Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menentukan tingkat korupsi di suatu pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah itu sendiri. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah menandakan semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka peluang untuk terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut semakin besar seiring dengan semakin banyaknya anggaran yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum di pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi.

*Transparency International Indonesia* telah melakukan survey untuk mengukur persepsi korupsi terhadap pemerintah daerah di Indonesia dengan hasil berupa nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam melakukan survey, *Transparency International Indonesia* mengambil responden dari pelaku usaha yang tersebar dari beberapa kota di Indonesia. Hasil penelitian atas responden-responden tersebut yang menjadi dasar pemberian nilai IPK pemerintah daerah di Indonesia. Skala penilaian IPK yaitu 1-10 dimana semakin besar nilai IPK suatu daerah maka persepsi korupsi terhadap pemerintah daerah tersebut semakin kecil.

Penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi sebelumnya telah dilakukan oleh Masyitoh, dkk (2015) dengan kesimpulan bahwa opini audit dan tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi sedangkan temuan audit atas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi namun temuan atas ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Persepsi korupsi yang diukur dalam penelitian tersebut didasarkan pada IPK pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masyitoh, dkk (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah di Indonesia, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh hasil pemeriksaan BPK (opini, temuan atas sistem pengendalian internal dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio efektifitas) dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK, KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi nilai IPK pemerintah daerah?
2. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah mempengaruhi nilai IPK pemerintah daerah?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah mempengaruhi nilai IPK pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dikaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap nilai IPK pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisa pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap nilai IPK pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisa pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap nilai IPK pemerintah daerah.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya adalah:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan IPK pemerintah daerah.
2. Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai IPK pemerintah daerah.
3. Temuan-temuan dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberi masukan pada penelitian berikutnya serta pengetahuan terkait pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap nilai IPK pemerintah daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab satu berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab satu terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Selain itu, bab dua juga membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang membahas mengenai uraian variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil olah data.

## BAB V: PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.